



## Tarif Retribusi TPA Piyungan Naik Tiga Kali Lipat

**YOGYA, TRIBUN** - Pemda DIY memutuskan menaikkan tarif retribusi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan per 2 Januari 2024. Pertimbangannya adalah kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, mengatakan, keputusan tersebut tertuang dalam Perda DIY No.11/2023 tentang Tarif Retribusi Sampah. Dia menjelaskan, saat ini tarif retribusi pembuangan sampah ke TPA Piyungan yakni sebesar Rp78 ribu per ton. Tarif ini naik tiga kali lipat, sebab sebelumnya tarif yang dipatok sesuai Perda nomor 14/2019 yakni sebesar Rp24.383.

"Penyesuaian tarif ini dilakukan lantaran selama kurang lebih empat tahun terakhir retribusi pembuangan sampah ke TPA Piyungan masih menggunakan tarif lama. Oleh karenanya, setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak, Pemda DIY memutuskan untuk memberlakukan tarif baru," terang Kusno, Kamis (4/1).

Namun Kusno menggaris bawahi, masing-masing daerah yakni Kota Yogyakarta, Bantul dan Sleman dibatasi kuota pembuangannya per hari hanya 370 ton. Jumlah ini berkurang dari Desember 2023, sebesar 450 ton per hari dengan

skema 3 hari kirim 1 hari off.

Ia pun mendorong agar kabupaten dan kota setempat untuk mempercepat persiapan program desentralisasi sampah di wilayahnya masing-masing. Pasalnya, menurut perhitungan DLHK DIY zona transisi 2 TPA Piyungan hanya mampu menampung sampah hingga akhir Maret 2024 mendatang.

"Sesuai kebijakan Pemda, bahwa pengolahan sampah desentralisasi ke kabupaten/kota harus dipercepat," ujarnya.

Sementara itu, kapasitas zona transisi 2 TPA Piyungan, Bantul, diperkirakan akan penuh pada April 2024 mendatang. Sebab itu, Pemda DIY mendorong akselerasi desentralisasi pengolahan sampah secara mandiri di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kartamantul).

"Jadi sekarang desentralisasinya berlaku menyeluruh, semula kan 2 kabupaten 1 kota yang memang kami kerjasamakan. Lalu ada Gunungkidul dan Kulon Progo, yang sudah mulai lebih awal desentralisasi sampahnya," terang Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono.

Lebih lanjut dijelaskan Beny, Sleman sudah lebih siap dalam pengolahan sampah secara mandiri dengan dioperasikannya tempat pengolahan sampah terpadu

di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan. Fasilitas itu mengolah sampah menjadi bahan bakar refuse derived fuel. Ini menjadi tahap awal kabupaten penyumbang sampah terbesar di DIY itu untuk menangani sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Adapun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tamanmartani diresmikan pengoperasiannya oleh Bupati Sleman Kustini Sri Pumomo, Kamis (21/12) lalu. Pembangunan fasilitas di lahan seluas 1,1 hektar itu menghabiskan total biaya Rp23,9 miliar.

"Sementara progres (desentralisasi sampah) di Kabupaten Bantul melalui Tempat Pengolahan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) di kalurahan-kalurahan juga digenjut persiapan untuk Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Modalan, Banguntapan, yang baru selesai pada triwulan tiga 2024," terang Beny.

Adapun TPST Modalan yang diperkirakan menghabiskan biaya senilai Rp22 miliar bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mampu menampung kapasitas 49 ton per hari. Selain untuk menampung sampah, di TPST ini juga akan ada mekanisme pengolahan sampah. **(han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005